

ABSTRAK

Ranti Alifia Syadilla (01656230056)

KEKUATAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM HASIL ALIH MEDIA SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN

(viii + 124 halaman ; 9 gambar ; 1 lampiran)

Terjadinya transformasi teknologi di bidang sektor pemerintahan khususnya di bidang pertanahan yaitu beralihnya sertipikat analog ke sertipikat elektronik ialah kebijakan baru bagi pemegang hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN dengan mengeluarkan Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023. Sertipikat elektronik tersebut bersumber dari hasil digitalisasi alih media. Alih media tersebut dari data fisik dan data yuridis sertipikat analog. Dalam kegiatan alih media tidak sekedar melakukan pemindaian data, tetapi harus menjaga autentikasi untuk menjamin keabsahan data. Tujuan penelitian untuk menganalisis kekuatan hukum dan perlindungan hukum hasil alih media dari data fisik dan data yuridis yang akan menerbitkan sertipikat elektronik dalam perspektif UU ITE dan Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode notmatif-empiris, dengan data primer menggunakan wawancara dengan narasumber dan sekunder diperoleh dari kajian sejumlah pustaka dan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian tersebut, dalam kekuatan hukum hasil alih media data yuridis dan data fisik sertipikat non-elektronik menjasi sertipikat elektronik ditentukan oleh kesesuaian data dan basis data yang valid sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 UU ITE. Sedangkan perlindungan hukum dari hasil alih media tersebut ditegaskan dalam Pasal 44 Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 yang menyebutkan Menteri ATR/BPN menjaga serta bertanggung jawab atas keamanan dalam penyimpanan data sertipikat elektronik, diimplementasikan dengan sertipikat tanah elektronik yang terdapat TTE, kode unik, dan *QR Code*. Mengenai keamanan data digital, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan BSSN.

Referensi : 32 (1997-2013)

Kata Kunci: Alih Media, Sertipikat Elektronik, Kekuatan dan Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Ranti Alifia Syadilla (01656230056)

LEGAL VALIDITY AND LEGAL PROTECTION OF DIGITIZED ELECTRONIC CERTIFICATES AT THE LAND OFFICE OF MEDAN CITY

(viii + 124 pages ; 9 pictures ; 1 attachment)

The technological transformation occurring within the government sector, particularly in the field of land affairs, is marked by the transition from analog certificates to electronic certificates. This shift represents a new policy for land rights holders, introduced by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) through the issuance of Ministerial Regulation No. 3 of 2023. The electronic certificates originate from the digitization process of analog media, which includes both physical and juridical data of the traditional land certificates. This digitization process involves more than merely scanning data, it must also ensure authentication to guarantee the validity of the data. The purpose of this research is to analyze the legal validity and legal protection of the digitized physical and juridical data that serve as the basis for issuing electronic certificates, within the perspective of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and Ministerial Regulation of ATR/BPN No. 3 of 2023. The research adopts a normative-empirical method, utilizing primary data gathered through interviews with relevant sources, and secondary data obtained from literature studies and relevant laws and regulations. Based on the findings, the legal validity of the digitized juridical and physical data used to convert non-electronic certificates into electronic certificates is determined by the accuracy and integrity of the data and the existence of a valid database, as stipulated in Article 6 of the UU ITE. Meanwhile, legal protection for the results of the digitization process is emphasized in Article 44 of Ministerial Regulation No. 3 of 2023, which states that the Minister of ATR/BPN is responsible for maintaining and ensuring the security of electronic certificate data storage. This is implemented through the issuance of electronic land certificates that include an electronic signature (TTE), a unique code, and a QR code. Regarding digital data security, the government has established a cooperation with the National Cyber and Crypto Agency (BSSN).

References : 32 (1997-2013)

Keywords: Data Migration, Electronic Certificate, Legal Authority and Legal Protection